

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia, Luky Sandra (editor), *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta
- _____, 2006, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Bandung
- _____, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, cet. kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Bisariyadi, dkk, 2016, *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Kepaniteraan dan Sekjend MKRI
- Budiarjo, Miriam., 2013, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Efriza, 2009, *Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Cet. 2, Alfabeta, Bandung.
- Gaffar, Jenedri M., 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press, Jakarta
- Ghafur, Jamaluddin dan Allan F. G. W., 2019, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Setara Press, Malang
- Goesniadhie S., Kusnu, 2009, *Hukum Konstitusi dan Politik Negara Indonesia*, Penerbit Nasa Media, Malang
- Hanan, Djayadi, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*, PT Mizan Publika, Bandung
- Harun, Refly., 2019, *Penafsiran Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2019, *Pengujian Undang-undang*, RajaGrafindo Persada, Depok
- Horowitz, Donal L., 1985, *Ethnic Groups in Conflict*, University of California Press, Barkeley

- _____, 2013, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. Cambridge University Press, New York
- Huda, Ni'matul., 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung
- _____, 2019, *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Penerbit Mizan, Bandung
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya model legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2020, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Cet. 2, Rajawali Press, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, Yogyakarta
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. Ke- 2, Kencana, Jakarta
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I*, Konstitusi Press. Jakarta
- _____, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V*, Konstitusi Press. Jakarta.
- Seran, 2013, Gotfridus Goris, *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Soekanto, Soejono. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia PressSulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang

_____, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemardjono, Maria. S.W., 2019, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Subekti, Valina Singka, 2008, *Menyusun Kontitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Ombak, Yogyakarta

Surbakti, Ramlan., 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Cet. ke 6. Grasindo. Jakarta

Yuda AR, Hanta., 2010, *Presidensialisme Setengah Hati*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

B. Jurnal

Aritonang, Dinoroy Marganda. “Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 22, Nomor 2

Asy’ari, S., Meyrinda RH., & M Mahrus A., “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013

Falaakh, M. F. “Konstitusi dalam berbagai lapisan makna”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 3. No. 3. September 2006

Ghoffar, Abdul, “Problematika Presidential Treshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 3 September 2018

Hanan. Djayadi, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”, *Jurnal Paramadina*, Vol. 13 Tahun 2016

Irfani, Nurfaqih, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, September 2020

Liddle, W., dan Mujani, “Indonesia in 2005: A New Multiparty Presidential Democracies”. *Asian Survey*, 46(I)

Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol INo. 1 November 2012

Rahayu Prasetyaningsih, "Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjadjaran*, Vol. III, No. 1, 2011

Rahman, Faiz, dan Dian Agung W., "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016

Triwahyuningsih, "Kajian Yuridis Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden Langsung dan Pelaksanaannya. *Jurnal Citizenship*, Vol 1 No, 2 Tahun 2018

Trzcinski, Krzysztof, "Centripetal Spatial Vote Distribution Requirement in Presidential Elections: The Cases of Nigeria and Indonesia", *Acta Aiatica Varsoviensia*, No. 30 Issue 1, 2017

C. Skripsi dan Tesis

Fitrah Bukhari, 2013, "Analisis Hukum Terhadap Putusan MK RI No. 50/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Terhadap UUD 1945", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Supriadi, 2013, "Analisis Pasal 6A ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 terhadap terbukanya peluang politik identitas etnis pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Purnama, Yantje, 2017, "Konstitusionalitas Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden calon tunggal", Skripsi pada FH Universitas Andalas

D. Internet

Amsari, Feri, "Arti Presidential threshold dalam pemilu", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c2c96b9b0800/arti-ipresidential-threshold-i-dalam-pemilu/>, diakses pada 20 Juni 2021

Arfana, Nano Tresna, "MK Tolak Permohonan Effendi Gazali", www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14800, diakses pada 23 Mei 2021

Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999,. <http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#FederalExecutive>, diakses pada 11 Juni 2021

Departemen Dalam Negeri RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden". [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/1\)%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20pemilu/5\)%](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/1)%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20pemilu/5)%)

[20Lain-](#)

[Lain/NASKAH%20AKADEMIK%20RUU%20PILPRES%2014%20MEI%202007.pdf](#), diakses pada 18 Mei 2021

Exploring Constitutional Conflicts, Theories of Constitutional Interpretation” (2006), <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/interp.html> diakses pada tanggal 02 Desember 2020.

Haris, Syamsuddin, “Salah Kaprah Presidential Threshold”, <https://aipi-politik.org/cabang/16-aipi/kolom-aipi/122-salah-kaprah-presidential-threshold> , diakses pada 3 Juni 2021

Huda, Ni'matul. pendapat dalam video berjudul “Sarasehan #25: "PUTUSAN MA TENTANG KEPUTUSAN KPU TAHUN 2019, APA IMPLIKASI HUKUM & POLITIKNYA?" pada chanel Youtube Pergerakan Indonesia Maju, <https://www.youtube.com/watch?v=YXXM3pASwus> , diakses pada 10 Juli 2021

Kementerian dalam Negeri, 2016, *Naskah Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf , diakses pada 22 Mei 2021

Mellaz, August. “Ambang Batas Tanpa Batas: Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5 persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasioanal UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu,.” <https://rumahpemilu.org/ambang-batas-tanpa-batas/> , diakses pada 3 Juni 2021

Paulus, Mujiran, “Membaca Koalisi Hasil Pemilu 2019” <https://kolom.tempo.co/read/1222534/membaca-koalisi-hasil-pemilu-2019/full&view=ok> , diakses pada 25 Mei 2021

E. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2019

F. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan BP MPR RI untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 tentang Pemberian kekuasaan legislatief kepada Komite Nasional Pusat (Berita Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 922)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85)